

## Gagasan

2 Menuju BUMN Kelas Dunia

## Aktivitas

4 Kementerian PU Diseminasikan Informasi Melalui Talk Show

## Event

5 Deklarasi Pemilukada Sumbar "Badunsanak" Berlangsung Meriah

## Seminar Strategi Komunikasi dan Pengelolaan Media Ditjen Pajak

# Jangan Abaikan Komunikasi Internal

Ada pemandangan berbeda di Auditorium Gedung Utama Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta (11/5). Sekitar 280 para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan se-Indonesia serius mendengarkan paparan mengenai strategi komunikasi DJP pasca terkuaknya makelar kasus yang melibatkan oknum DJP Gayus Tambunan.

Selama dua hari (11-12/5) Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2H) DJP menggelar rakernas yang salah satu rangkaian kegiatannya adalah paparan terkait strategi komunikasi dan pengelolaan media DJP pasca kasus Gayus yang disampaikan Direktur Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi.

Dalam paparannya, Heri mengatakan, selama ini strategi komunikasi eksternal DJP terkait sosialisasi dan penyuluhan Pajak sudah sangat optimal dan dapat dikatakan berhasil. Instansi ini berhasil menggunakan berbagai saluran untuk mengkampanyekan pajak kepada masyarakat. Saluran variatif dan kreatif seperti website, kring pajak, e-mail

center, SMS alert, below the line, above the line, e-reg NPWP, Pojok Pajak, dan Mobil Pajak Keliling, berhasil meningkatkan awareness para Wajib Pajak.

Namun, terkuaknya makelar kasus di DJP menjadi isyarat bahwa komunikasi eksternal yang optimal juga harus diimbangi dengan program komunikasi internal yang maksimal juga. Menurut Heri, kasus Gayus dapat dijadikan momentum oleh DJP untuk melakukan perubahan mendasar baik sistem maupun kultur agar kasus Gayus tidak terulang lagi.

Salah satu alat untuk menggerakkan perubahan mendasar ini adalah dengan lebih mengintensifkan program-program komunikasi dan kampanye internal yang ditujukan untuk semua pegawai DJP. "Perlu program-program komunikasi internal yang memberikan pemahaman

bahwa pegawai DJP adalah duta-duta institusinya. Apa yang dipersepsikan publik terhadap DJP sangat ditentukan oleh tingkah laku dan pola hidup para pegawainya," jelas Heri.

Program-program komunikasi ini diselenggarakan dengan penguatan *law enforcement* berupa penindakan dan pencegahan internal yang dibarengi juga dengan berbagai kegiatan penguatan integritas



Direktur Bamboedoea Heri Rakhmadi saat memaparkan Strategi Komunikasi dan Media Ditjen Pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta (11/5)

aparatur DJP. Kesemuanya ini dibingkai dalam semangat untuk melakukan perubahan sistem yang mendasar di DJP misalnya terkait sistem dan hukum perpajakan, transparansi pengelolaan keberatan pajak, atau penguatan "whistle blower system" agar ke depan DJP bebas dari praktik-praktik seperti yang dilakukan Gayus.

"Komunikasi eksternal DJP yang sudah cukup bagus harus diimbangi dengan komunikasi internal yang berkualitas juga. Komunikasi internal tidak kalah penting dengan komunikasi eksternal. Namun, inilah yang sering dilupakan pelaku PR," ungkap Heri.



Direktur P2 Humas Ditjen Pajak M. Iqbal Alamsjah memberikan plakat penghargaan kepada Heri Rakhmadi.



Heri Rakhmadi

### Bubble PR

Istilah *bubble* atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti 'gelembung' pernah populer pada era 90-an. Istilah ini—*bubble economic*—dipakai para ekonom untuk menggambarkan pembangunan semu di bidang ekonomi pada Orde Baru. Intinya, istilah ini ingin menegaskan bahwa sesuatu yang dipermukaan kelihatan berhasil, bagus, dan bombastis, ternyata hanya kemassannya saja, sementara fundamentalnya lemah.

Mengamati perkembangan PR dewasa ini, sepertinya istilah '*bubble*'—*bubble PR*—dapat juga dilekatkan ke beberapa praktik PR yang terjadi belum lama ini. Citra dan reputasi menjadi sebuah 'gelembung' ketika hanya kemasannya saja yang dikomunikasikan atau istilah tepatnya 'dipropagandakan' kepada khalayak. Sementara kampanye perubahan reputasi belum lama tuntas.

Contoh terbaru adalah praktik PR salah satu calon Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD), Andi Mallarangeng (AM). Praktik PR AM menjadi Ketum PD jauh lebih intensif, variatif, dan kreatif, dibanding dua calon lain. AM menggunakan semua saluran komunikasi (*below/above the line*) untuk meyakinkan kader PD bahwa dia layak memimpin partai pemenang Pemilu 2009 itu. Namun, pada saat pemilihan, AM bahkan tidak lolos putaran I. Kampanye dukungan kader PD yang massif ternyata hanya kemasannya, dan kemasannya itulah yang 'dipropagandakan' AM.

Praktik '*bubble PR*' juga dapat kita saksikan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sejauh ini dapat dikatakan DJP adalah salah satu institusi yang berhasil meningkatkan *awareness* publik terhadap kewajiban membayar pajak lewat program-program PR-nya. Indikasinya adalah peningkatan penerimaan pajak dua kali lipat dan jumlah Wajib Pajak bertambah tiga kali lipat hanya dalam waktu tiga tahun. Lewat berbagai saluran informasi (*below/above the line*) yang diramu dengan program PR yang kreatif, DJP berhasil mengubah *mindset* publik dari membayar pajak sebagai beban menjadi sebuah kebanggaan.

Tetapi, program komunikasi internal untuk mendukung reformasi perpajakan dalam memperbaiki kultur tidaklah sesemarak kampanye eksternal. Masih ada oknum petugas pajak yang tidak bangga menjadi 'lebah penghisap madu' dan tidak berintegritas seperti Gayus. Satu-dua oknum saja sudah membuat citra DJP terpuruk. Kampanye penguatan integritas dan rasa bangga menjadi bagian sebuah institusi serta *law enforcement* dapat menjadi 'tembok' pencegah penyelewengan. Dan rasa bangga ini hanya bisa tertanam lewat program-program komunikasi internal.

# Menuju BUMN Kelas Dunia

*Kapitalisasi BUMN di pasar modal menunjukkan tren yang positif. Momentum tepat menarik minat investor asing untuk memiliki saham di BUMN Indonesia.*

Ada berita menarik di *Bisnis Indonesia* terbitan 7 April 2010 lalu. Di media bisnis paling bergengsi itu pada halaman depannya tercantum judul yang sangat menggembirakan sekaligus membanggakan. "Grup BUMN Paling Bersinar." Demikian judul besar yang ditabalkan secara besar-besaran. Tulisan yang disertai infografis menarik tersebut menjelaskan emiten grup BUMN mendominasi pertumbuhan kinerja tertinggi tahun lalu, dengan rata-rata pertumbuhan laba bersih sebesar 81 persen. Total laba bersih emiten plat merah ini menembus Rp32,77 triliun. Sektor-sektor yang tetap akan bersinar pada tahun ini adalah perbankan, telekomunikasi, dan pertambangan yang diproyeksikan mampu menggenjot kinerja emiten badan usaha milik negara ini.

Seperti dikutip *Bisnis Indonesia*, Franco Sutedjowidjaja, Kepala Riset Ciptadana Sekuritas memproyeksikan lima konglomerasi dapat mencetak pertumbuhan kinerja khususnya laba bersih dan penjualan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini terpicu oleh stabilitas pasar modal, tingkat suku bunga rendah, rupiah yang menguat, dan aliran dana pemodal asing. Data Bisnis Indonesia Intelligence Unit (BIUU) menyebutkan di antara lima grup konglomerasi penyumbang 53,68

persen kapitalisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI), hanya grup Bakrie yang kinerjanya kurang maksimal. Empat grup lain yakni BUMN tumbuh 81 persen, disusul Sinarmas 55, 61 persen, Salim mencapai 19, 46 persen, dan kelompok usaha Astra naik 11, 74 persen. Capaian tersebut mengubah peta rekor pertumbuhan laba antar konglomerasi.

Di antara perusahaan plat merah, PT Perusahaan Gas Negara Tbk menyumbang kenaikan laba bersih tertinggi sebesar 882,72 persen. Dari sisi nominal, laba bersih dua emiten bank, yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk tercatat paling besar di antara BUMN, masing-masing senilai Rp7,31 triliun dan Rp7,19 triliun.

Kepala Riset PT Bhakti Securities Edwin Sebayang menilai laba bersih BRI berpotensi naik tahun ini menjadi Rp9,10 triliun dari perolehan tahun lalu yang mencapai Rp7, 31 triliun. Bank Mandiri juga diperkirakan tetap menunjukkan performa yang baik pada tahun ini. "Tidak hanya BUMN perbankan, kinerja BUMN pertambangan seperti Bukit Asam dan Antam juga akan naik," tutur Edwin seperti dikutip *Bisnis Indonesia* (07/04).

Tentu saja, apa yang digambarkan harian *Bisnis Indonesia* tersebut menjadi salah satu bukti bahwa saat



Sebagian dari Team Non Deal Road Show BUMN.



ini pengelolaan BUMN sudah pada arah yang benar (*On The Right Track*) dan benar-benar menjadi kebanggaan bangsa.

## Non Deal Roadshow

Di tengah masih adanya keraguan akan kinerja BUMN, bersinarnya konglomerasi grup BUMN memang terasa amat membanggakan. Untuk itulah, kondisi tersebut harus dijadikan momentum yang baik untuk mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia. Mengapa? Karena secara kapasitas SDM maupun *performance*-nya, banyak BUMN yang tidak kalah kemampuannya dengan perusahaan asing/global yang telah mapan. Untuk itu sejumlah langkah telah dipersiapkan Kantor Kementerian BUMN untuk mentransformasikan BUMN sebagai perusahaan-perusahaan kelas dunia. Salah satunya dengan menggelar kegiatan *Non Deal Roadshow* ke Singapura dan Hongkong pada 26-29 April lalu.

*Non Deal Roadshow* merupakan pemaparan situasi terkini perusahaan dan ekonomi Indonesia tanpa kontrak mengikat kepada calon investor asing. Kegiatan yang diprakarsai Kementerian BUMN dan BUMN yang berkecimpung dalam pengelolaan keuangan seperti Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Bahana Sekuritas bertujuan menarik minat investor asing menanamkan modalnya di pasar modal Indonesia.

*Non Deal Roadshow* juga bertujuan untuk menggambarkan kepada investor asing tentang langkah-langkah dan program kerja Kementerian BUMN dalam memanfaatkan pemulihan ekonomi Indonesia serta memberi gambaran BUMN yang akan melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dan mendapatkan pandangan dari investor potensial. Kegiatan *Non Deal Roadshow* tentunya tidak terlepas dari kapitalisasi BUMN di pasar modal Indonesia yang terus menguat dan hingga saat ini

mencapai 31,5 persen.

Selain menjadi salah satu negara yang tumbuh positif, Indonesia juga diuntungkan dengan rendahnya laju inflasi dan semakin menumpuknya cadangan devisa. Adapun kinerja pasar modal semakin membaik dengan naiknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sekitar 12 persen sejak awal tahun hingga pertengahan April 2010. Dengan adanya *Non Deal Roadshow*, maka akan membuat arus modal yang masuk ke Indonesia menjadi tinggi sehingga akan mendongkrak harga saham. Peningkatan harga saham, akan menambah kapitalisasi pasar sehingga bisa menambah aset pemegang saham emiten. Atas dasar itu, Indonesia perlu agresif untuk mengundang calon investor asing masuk ke Bursa Efek Indonesia.

Dalam kegiatan *Non Deal Roadshow* ini, Kementerian BUMN membawa delapan BUMN yang sudah *listed* seperti Aneka Tambang, Bank Mandiri, BNI, BRI, PGN, Jasa Marga, Bukit Asam, dan Telkom. Dua perusahaan yang akan *go public* seperti Garuda Indonesia dan Krakatau Steel juga diikutsertakan. Selama kegiatan *Non Deal Roadshow* berlangsung di Singapura, Kementerian BUMN telah mengundang sekitar 50 perusahaan yang memiliki minat besar untuk memiliki saham di BUMN Indonesia. Untuk kegiatan *Non Deal Roadshow* di Hongkong, pemerintah juga telah mengundang sekitar 50 perusahaan yang akan menjadi calon investor.

Untuk memaksimalkan publikasi kegiatan *Non Deal Roadshow*, sejumlah upaya *media relations* juga diintensifkan, baik sebelum acara maupun saat kegiatan berlangsung di Singapura dan di Hongkong. Sebelum kegiatan *Non Deal Roadshow* berlangsung misalnya, diadakan diskusi media (*media update*) bertajuk "Membedah

Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Pasar Modal" yang diselenggarakan Danareksa. Diskusi media yang digelar di Hotel Grand Hyatt, Jakarta menghadirkan Equity Capital Market PT Danareksa Chandra Pasaribu, Direktur Utama PT Perneringkat Efek Indonesia (Pefindo), Kahlil Rowter dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Edgar Ekaputra sebagai narasumber. Antusiasme wartawan untuk meliput kegiatan tersebut terbilang besar mengingat jumlah wartawan yang datang mencapai 100 orang.

Selain itu, pada setiap kali jumpa pers Menteri BUMN Mustafa Abubakar selalu memberikan penjelasan tentang *Non Deal Roadshow*. Begitu pula saat acara berlangsung, kegiatan wawancara mendalam dengan narasumber juga selalu diagendakan.

Kegiatan *Non Deal Roadshow* memang terbukti tidak sia-sia. Muhibah bisnis *Non Deal* yang berlangsung di dua negara ini telah berhasil menjaring komitmen investasi senilai lebih dari Rp100 triliun. Dalam pandangan Mustafa, hal tersebut merupakan hasil yang bagus sekali. Apalagi investor yang datang dan tertarik merupakan investor global ternama.

Besarnya minat investasi itu menunjukkan respons yang sangat positif para investor global terhadap prospek perekonomian Indonesia. Lebih khusus lagi respons positif atas kinerja BUMN di pasar modal.



Diskusi Media "Membedah Kinerja BUMN di Pasar Modal", Jakarta, 21 April 2010.

*Non Deal Roadshow* terbilang terobosan yang inovatif. Pasalnya, kegiatan muhibah bisnis tanpa kontrak mengikat ini tidak hanya berhasil menjaring komitmen investasi senilai lebih dari Rp100 triliun dari para calon investor asing, tapi juga cukup sukses mendominasi pemberitaan bidang ekonomi dan bisnis di hampir semua surat kabar dan media *online*. Boleh dibilang, kegiatan yang diselenggarakan Kementerian BUMN bersama BUMN yang berkecimpung dalam pengelolaan keuangan ini, benar-benar menyedot perhatian media.

Selama empat hari berlangsung, pemberitaan tentang *Non Deal Roadshow* selalu menghiasi rubrik ekonomi dan bisnis media massa. Tidak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai

30 pemberitaan. Istimewanya, selama kegiatan *Non Deal Roadshow* berlangsung, hampir tidak pernah ada *tone* pemberitaan yang negatif. Semua pemberitaan, merespon positif kegiatan *Non Deal Roadshow*.

Dari segi pemberitaan, kegiatan *Non Deal Roadshow* memang benar-benar menawarkan *news value* yang tinggi bagi kalangan media. Mengapa? Sebab selama ini berita-berita tentang BUMN selalu diwarnai oleh aksi-aksi korporasi masing-masing BUMN. Untuk itulah, tidak ada salahnya bila *event* semacam *Non Deal Roadshow* ini juga terus diadakan. Tentunya dengan konsep dan terobosan yang lebih menarik sehingga dapat memperoleh *news value* yang lebih tinggi.

## Kementerian PU Diseminasikan Informasi Melalui Talk Show



Rangkaian Talk Show Kementerian PU, dari kiri ke kanan: Wakil Menteri PU Hermanto Dardak (Public Corner Metro TV), Sekjen Kementerian PU Agoes Widjanarko (Dialog PU TVRI), Dirjen SDA Moch. Amron dan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono (Dialog PU TVRI).

Setengah jam sebelum masuk studio, wajah Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono, terlihat gelisah. Raut mukanya menampakkan ketegangan. Apalagi setelah mendapat informasi Menteri Perumahan Rakyat, Soeharso Monoarfa yang sedianya menjadi narasumber utama, mendadak batal datang. Budi Yuwono, yang selama ini terkenal sebagai pejabat yang ramah, langsung termenung, dan bertanya-tanya ada apa ini?

Sepuluh menit kemudian, Budi Yuwono yang juga narasumber program talk show "Public Corner" Metro TV bertajuk "Urbanisasi berkelanjutan: Tanggung Jawab Siapa?" diminta masuk ke studio karena acara akan dimulai. Singkat cerita, usai talk show wajah Budi tampak sumringah. Perasaannya lega karena berhasil melewati talk show dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan presenter, dijawab dengan lugas dan artikulatif. "Tidak memalukan kan penampilan saya," ujarnya bangga.

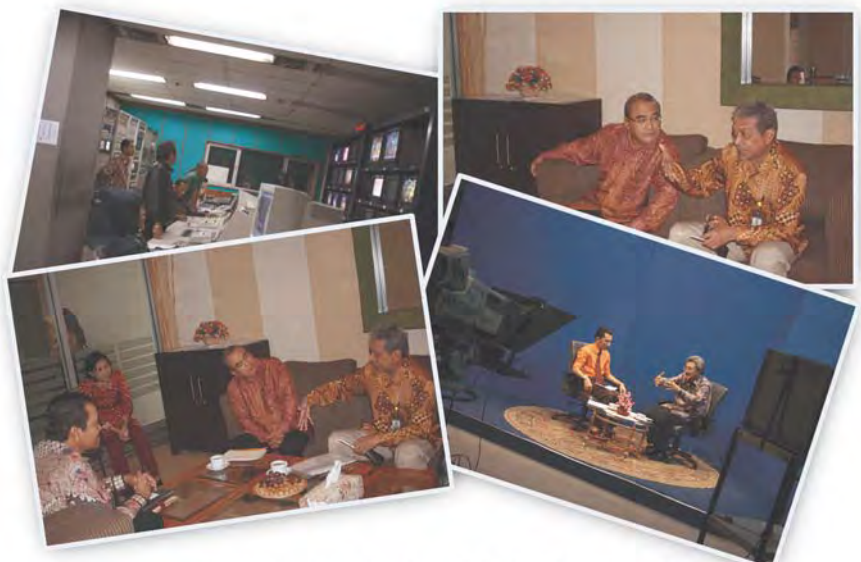
Itulah sekelumit persiapan program talk show "Public Corner" Metro TV dengan narasumber dari Kementerian PU. Sebelumnya, pada program yang sama juga pernah tampil Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Direktur Jalan dan Jembatan Wilayah Barat Hedyanto W. Husaini, dan Direktur Penataan Ruang Wilayah II Sri Apriatini Soekardi. Herman Dardak terlihat lebih percaya diri dan santai sebelum talk show berlangsung. Sementara Sri Apriatini, dengan tekun membaca beberapa catatan ringkas yang sengaja dibuatnya sebelum memasuki studio. Hasilnya, saat talk show berlangsung, Sri

Apriatini tampak sangat menguasai persoalan pengarusutamaan gender yang menjadi tema talk show. Dengan komunikatif, dia dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan presenter dengan baik.

Talk Show Kementerian Pekerjaan Umum juga berlangsung di TVRI setiap pukul enam pagi. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Agoes Widjanarko terpaksa harus datang sebelum pukul enam pagi untuk mengisi acara talk show tersebut. Sementara, Dirjen Bina Marga Joko Muryanto terpaksa harus menunggu sekitar setengah jam saat rekaman pengambilan gambar program talk show karena terganggu masalah teknis di studio yang tidak bekerja dengan baik. Beruntung, pada menit-menit terakhir, masalah kerusakan teknis dapat diatasi. Rekaman pun langsung dimulai. Pejabat Kementerian Umum lainnya yang pernah menjadi narasumber talk show di TVRI adalah

Direktur Irigasi Ditjen SDA Imam Agus Nugroho serta Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Setia Budhy Algamar.

Begitulah. Sejak program *intrated communications* Kementerian Pekerjaan Umum bergulir, kesibukan awak Pusat Komunikasi Publik (Puskompu) Kementerian Pekerjaan Umum semakin bertambah. Bermitra kerja dengan Bamboedoea Communications, mereka intensif melakukan program sosialisasi dan komunikasi seputar berbagai hal tentang pekerjaan umum yang tengah menjadi wacana publik. Dari beragam aktivitas komunikasi yang digelar, program talk show di stasiun tv merupakan kegiatan yang menuntut perhatian yang lebih besar. Semua itu, tentu saja semata-mata agar hasil dan manfaat program talk show bisa berdampak lebih maksimal bagi masyarakat.



Suasana Persiapan Rangkaian Talk Show Kementerian PU



## Pemilukada Sumbar Deklarasi Pemilukada *Badunsanak* Berlangsung Meriah



Para Calon Kepala Daerah Sumatera Barat sedang membacakan ikrar untuk melaksanakan Pemilukada "Badunsanak, Damai, dan Berkualitas", Padang (10/5).

Ada pemandangan yang tidak biasa—sebuah kemeriahan—di Halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), pada Senin (10/5) lalu. Ratusan orang dengan wajah antusias, berkumpul menyaksikan sebuah perhelatan besar dan penting bagi Provinsi Sumatera Barat. Sebuah perhelatan untuk mengikat komitmen para calon kepala daerah yang akan berkompetisi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sumbar.

Memang, pada 30 Juni 2010, Sumbar menggelar hajatan besar yaitu

penyelenggaraan 14 pemilukada serentak yang meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumbar, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Limapuluh Kota, Tanah Datar, Sijunjung, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan dan pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Bukittinggi serta Kota Solok.

Kemeriahan acara deklarasi damai yang bertajuk "*Pemilu Badunsanak, Damai dan Berkualitas*" ini sudah mulai kelihatan ketika para penari mulai beraksi menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Ketua KPU A.Hafiz Anshary, dan Ketua KPU Sumbar Marzul Veri, serta ketua KPU Kalimantan Timur dan KPU Jawa Timur. Tari Pasambahan ini disambut dengan sorak-sorai masyarakat yang menyaksikan acara.

Suasana semakin meriah dengan kehadiran para calon kepala daerah yang mengenakan busana seragam yaitu pakaian khas Sumbar. Dengan semangat kekeluargaan para calon kepala daerah mengucapkan ikrar untuk melaksanakan pemilukada

*badunsanak* yang diikuti dengan penandatanganan komitmen.

Usai penandatanganan deklarasi, Mendagri didampingi Ketua KPU dan Ketua KPU Sumbar memukul bedug dan melepaskan balon merah putih sebagai harapan pemilukada di Sumbar akan berlangsung damai dan berkualitas. Kemeriahan dan antusias masyarakat semakin bertambah saat diaraknya calon bupati dan walikota dari 13 daerah dengan kereta wisata dan lima pasangan calon gubernur/calon wakil gubernur dengan kereta kuda keliling Kota Padang. Sepanjang jalan, para calon menyapa dan melambaikan tangan kepada masyarakat yang menyaksikan pawai dari pinggir jalan.

Acara Deklarasi Pemilu Badunsanak ini mendapat liputan luas media. Karena, sebelumnya (6/5), Ketua KPU Sumbar Marzul Veri mengabarkan kegiatan ini kepada media massa saat konferensi pers persiapan Pemilukada Sumbar di Media Center KPU, Jakarta. Acara konferensi pers ini sendiri, dikoordinir oleh Bamboedoea.

## Transparansi BUMN dalam UU KIP



Menteri BUMN Mustafa Abubakar.

Dengan adanya UU KIP, ada dua hal yang harus dilakukan BUMN. Pertama, wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat, dan proporsional. Kedua, wajib membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi; pembangunan infrastruktur teknis dan kelembagaan pelayanan informasi; serta merancang sistem penyediaan dan pelayanan informasi publik.

Demikian dipaparkan Menteri BUMN Mustafa Abubakar pada seminar Transparansi BUMN dalam Implementasi UU KIP pada 10 Maret lalu di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta. Sebelum UU KIP disahkan, sebenarnya BUMN telah menerapkan kaidah-

kaidah transparansi dan keterbukaan informasi publik. Pasal 5 Ayat 3 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN misalnya, menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Kementerian BUMN sendiri, kata Mustafa, dalam rangka mengedepankan prinsip-prinsip transparansi juga telah mengeluarkan SK Menteri Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Implementasi UU KIP yang berlangsung mulai 1 Mei 2010, diharapkan akan semakin memperkuat penerapan praktik-praktik transparansi dan pelayanan publik di BUMN.

Praktik-praktik GCG, setidaknya sudah terlihat dengan terpilihnya sembilan BUMN yang memperoleh skor integritas tertinggi sesuai penilaian KPK pada 2009. "Hal ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan. Saya berharap

BUMN-BUMN lainnya juga bisa mengikuti," tutur Mustafa memotivasi.

Seminar yang berlangsung sejak pagi hingga sore ini, terdiri dari dua sesi dan dihadiri oleh sekitar 200 peserta yang umumnya praktisi humas BUMN. Seminar ini menghadirkan empat pembicara antara lain: Sekretaris Menteri BUMN M. Said Didu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Ahmad M. Ramli, Wakil Ketua Komisi Informasi Publik Henny S Widyaningsih, dan Direktur Utama Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi. Seminar yang mendapat apresiasi positif dari Menteri BUMN, para pembicara maupun peserta ini digagas oleh Bamboedoea Communications serta difasilitasi oleh Humas Kementerian BUMN dan majalah *BUMN Track*.



## Wajah Baru Circle K News Flash

Salah satu fungsi dari adanya media internal dalam sebuah organisasi, lembaga, maupun korporasi adalah untuk meningkatkan kualitas komunikasi antarpersonal dan sebagai medium penyampaian informasi dan pesan. Salah satu media internal yang sering digunakan adalah *newsletter*. Sebagai perusahaan ritel kelas dunia, Circle K menyadari pentingnya sebuah media internal untuk meningkatkan komunikasi dan berbagi informasi antarkaryawan.

Mulai April 2010, media internal Circle K "*News Flash*" tampil dalam format baru yang lebih *fresh* dan informatif baik dari sisi *design*, tata letak, rubrikasi, dan materi informasi atau berita. Untuk menampilkan format baru *Circle K News Flash* yang terbit tiap dua bulan ini, PT Circle K Indonesia menunjuk Bamboedoea Communication sebagai konsultannya.

Bamboedoea melakukan pekerjaan mulai dari peliputan, *design* hingga konten. Oleh tim *design* dan konten Bamboedoea, *Circle K News Flash* ditampilkan lebih variatif dan informatif sehingga semua informasi dan pesan yang ingin disampaikan pihak manajemen dapat dipahami semua karyawan, tentunya dikemas dalam tampilan/*design* yang atraktif dan menarik.



Direktur Utama PT Circle K Indonesia Cahyadi Heriantio mengatakan, lewat wajah baru *Circle K News Flash* ini diharapkan semua informasi, aktivitas, dan kegiatan Circle K dapat sampai dan dipahami semua karyawan dan menjadi inspirasi untuk bekerja lebih baik lagi.



Suasana "Sarasehan Kehumasan" di Kementerian PU, Jakarta (2/6).

Salah satu tujuan yang ingin diciptakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah semua Badan Publik mempunyai sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan proporsional. Agar tujuan ini tercapai, Badan Publik harus membuat sebuah badan khusus untuk menangani informasi publik.

Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) Agoes Widjanarko dalam acara Sarasehan Kehumasan, Rabu (2/6) di Jakarta menjelaskan, untuk memberikan pelayanan informasi publik yang maksimal perlu dibentuk badan pengelola tersendiri agar lebih fokus. Badan ini nantinya dibawah kendali Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID). "Tugas kita dalam memberikan pelayanan kepada publik sebaik mungkin dapat dilaksanakan," ujarnya di depan 60 pelaku praktisi kehumasan.

Hal senada diungkapkan Kepala Puskom PU Amwazi Idrus dan Kepala Pusdata PU Waskito Pandu. Keduanya

Serasehan Kehumasan PU

## Saatnya Melayani Publik dengan Informasi

memandang UU KIP merupakan penyemangat bagi praktisi kehumasan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada publik. UU ini juga dinilai sebagai pemicu agar menyajikan informasi yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Pembicara utama sarasehan Heri Rakhmadi, dalam paparannya menjelaskan, era keterbukaan saat ini telah membawa perubahan yang cukup signifikan khususnya bagi publik yang menginginkan kemudahan dalam memperoleh informasi di lingkungan instansi pemerintah.

Namun, masih ada permasalahan kehumasan pemerintah di era reformasi saat ini. "Terdapat *gap* antara kemampuan PR (*Public Relations*) dengan tuntutan publik dalam memberikan pelayanan kecepatan informasi. Sehingga citra dan reputasi lembaga publik dinilai rendah, padahal sebenarnya kinerjanya cenderung membaik," ujar Heri.

Khusus untuk program kehumasan di Kementerian PU, Heri memandang belum ada program kehumasan PU yang terintegrasi dan terkonsolidasi. Hal ini ditandai adanya masing-masing unit yang menjalankan program komunikasi sendiri-sendiri dan hampir sama. Heri juga menilai, PU harus lebih meningkatkan hubungan baik dengan *stakeholders* utama agar kinerja PU yang semakin meningkat dapat diketahui khalayak.